

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGHADAPI KEKERINGAN DI
DESA BASUHAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Barlian Desi Fauziah

NPP. 31.0434

Asdaf Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: barlian.fauziah@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Heru Sulistiyo, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Drought is a natural disaster that cannot be predicted and occurs every year in Indonesia. Drought has an impact on meeting human needs, especially economic stability. The village government plays a role in helping village communities to overcome drought, especially in terms of distributing clean water so that areas affected by drought can be reduced. Despite this, village communities still have to buy clean water via tank trucks, which hampers economic stability. **Purpose:** The aim of this research is to describe the role of village government in dealing with drought in Basuhan Village, Eromoko District, Wonogiri Regency, Central Java Province. **Method:** This research uses a qualitative approach method with descriptive analysis according to role theory by Ryaas Rasyid. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this research are that the village government has carried out its role in dealing with drought, including the village government as a facilitator, catalyst, regulator and dynamist. The main obstacle in the role of village government is the natural structure that does not allow the area to produce agricultural products. **Conclusion:** Agricultural production in Basuhan Village during the long dry season cannot continue and relies on other alternatives. The Village Government carries out the role of village government as a facilitator, catalyst, regulator and dynamist. However, efforts from all parties are still needed to improve community welfare during the long dry season.

Keywords: Agriculture, Drought, Role, Village Government

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Kekeringan merupakan bencana alam yang tidak dapat diprediksi dan terjadi setiap tahun di Indonesia. Kekeringan berdampak pada pemenuhan kebutuhan manusia khususnya kestabilan perekonomian. Pemerintah desa berperan dalam membantu masyarakat desa untuk mengatasi kekeringan khususnya dalam hal pembagian air bersih sehingga daerah terdampak kekeringan dapat berkurang. Meskipun demikian, masyarakat desa masih harus membeli air bersih melalui truk tangki sehingga menghambat kestabilan perekonomian. **Tujuan:**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam menghadapi kekeringan di Desa Basuhan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan uraian analisis deskriptif menurut teori peran oleh Ryaas Rasyid. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa telah melaksanakan perannya dalam menghadapi kekeringan antara lain pemerintah desa sebagai fasilitator, katalisator, regulator, dan dinamisator. Hambatan utama dalam peran pemerintah desa adalah struktur alam yang tidak memungkinkan daerah tersebut untuk memproduksi produk pertanian. **Kesimpulan:** Produksi pertanian di Desa Basuhan saat musim kemarau panjang tidak dapat berjalan dan mengandalkan alternatif lain. Pemerintah Desa melaksanakan peran pemerintah desa sebagai fasilitator, katalisator, regulator, dan dinamisator. Namun masih perlu upaya dari semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada saat musim kemarau panjang.

Kata kunci: Kekeringan, Pemerintah Desa, Peran, Pertanian

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekeringan yang terjadi berhubungan dengan adanya fenomena El Nino yang ditandai dengan kemarau berkepanjangan melanda beberapa wilayah di Indonesia. Dampak kekeringan itu sendiri sangatlah luas terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Perekonomian menjadi aspek yang mendapatkan dampak paling besar karena kelangkaan air bersih memaksa masyarakat untuk membeli air bersih untuk kehidupannya. Sehingga masyarakat terpaksa mengeluarkan biaya lebih selain kebutuhan pokok sehari-harinya.

Jumlah warga yang terdampak bencana kekeringan terus meningkat hingga minggu ketiga September 2023. Periode 14-21 September 2023, BNPB memantau paling sedikit 166.415 jiwa mengalami krisis air bersih yang tersebar di 11 provinsi. Sebelumnya, pada 27 Juli-3 Agustus 2023, kekeringan berdampak pada 19.581 jiwa. Peningkatan tersebut dapat terus terjadi setiap tahunnya (Prasetyo, 2023).

Provinsi Jawa Tengah mengalami kejadian bencana paling banyak yaitu 25 kejadian. Diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kejadian bencana kekeringan yaitu 14 bencana dan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 3 bencana. Provinsi Papua merupakan provinsi paling sedikit jumlah kejadian bencana dengan jumlah 1 bencana.

Kabupaten Wonogiri merupakan wilayah yang terdampak kekeringan dengan kategori awas berdasarkan data BMKG bulan September 2023 (Purbaya, 2023). Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah melakukan gerakan penanganan masalah kekeringan berkepanjangan ini dengan pemasangan jaringan air bersih (Cahyono, 2023). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana serta mengurangi risiko terjadinya bencana. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri mengupayakan penanganan kekeringan atau krisis air bersih sebagai program prioritas dengan mengusahakan solusi yang permanen (wonogirikab, 2023).

Pemerintah daerah berkontribusi dalam menangani kasus kekeringan di Kabupaten Wonogiri dengan membangun jaringan air bersih dan memaksimalkan penggunaan sumber air. Selanjutnya, upaya yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat bersama-sama menjaga kondisi sumber air

dengan rehabilitasi lahan dan merawat daerah tangkapan air hujan. Pemerintah memiliki kontribusi penuh dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi Pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi perlindungan. Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development) (Solihah, 2019).

Pemerintah desa dalam hal ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan. Pemerintah desa memiliki wewenang strategis untuk mengendalikan kehidupan masyarakat khususnya dalam menangani bencana.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGHADAPI KEKERINGAN DI DESA BASUHAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri (2023), terdapat 25 desa yang tersebar di tujuh kecamatan Kabupaten Wonogiri merupakan daerah rawan kekeringan yang mengalami krisis air bersih. Total 6.487 keluarga atau 18.920 jiwa di Kabupaten Wonogiri mengalami kekeringan dampak musim kemarau panjang ini. Sebagian warga memenuhi kebutuhan air bersih dengan membeli air bersih melalui penjual dengan truk tangki dengan kisaran harga Rp 150.000 per tangki sebanyak 6.000 liter (Praditia, 2023).

Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kecamatan Eromoko adalah sebagai petani didukung oleh potensi negara Indonesia merupakan negara agraris. Fenomena kekeringan tentu memiliki dampak pada produksi pertanian. Kekeringan dapat mengakibatkan lahan pertanian kering dan akibatnya penurunan baik kualitas maupun kuantitas produksi pertanian. Produksi pertanian berbeda-beda setiap wilayah di Kecamatan Eromoko tergantung pada kondisi wilayah setiap desa.

Pada tahun 2022, palawija yang dihasilkan Kecamatan Eromoko ialah jagung, kacang tanah, dan ubi kayu. Desa Basuhan merupakan salah satu dari 15 desa yang ada di wilayah Kecamatan Eromoko. Desa Basuhan juga merupakan salah satu wilayah yang terdampak kekeringan sehingga menyebabkan penurunan produksi pertanian. Desa Basuhan memiliki wilayah yang luas dan merupakan wilayah pegunungan yang jauh dari kota sehingga bantuan penyaluran air bersih juga terhambat akses.

Desa Basuhan merupakan desa yang paling luas kedua setelah Desa Pucung dengan luas wilayah 11,44 km² sehingga presentase terhadap luas kecamatan adalah 9,50%. Wilayah yang luas di Desa Basuhan memberikan pengaruh pada penggunaan lahan pertanian dan produksi panen pertanian. Desa Basuhan merupakan desa yang paling jauh kedua setelah Desa Ngandong untuk menempuh ke Ibukota Kecamatan. Desa Basuhan juga merupakan desa terjauh untuk menuju ke Ibukota Kabupaten. Jarak yang jauh ke ibukota berpengaruh dalam kemudahan akses penyaluran air bersih yang dapat membantu mengurangi dampak kekeringan di Desa Basuhan. Akses yang jauh dari kota berpengaruh dalam ketersediaan air bersih dikarenakan kesulitan distribusi air bersih.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan 6 (enam) sumber penelitian terdahulu sebagai referensi dengan memperhatikan keserasian dan kesamaan dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Maria Yasinta (2023) dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Air Bersih di Dusun Watutena Desa Hikong. Hasil penelitiannya adalah peran pemerintah desa dalam menyalurkan air bersih meliputi pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, koordinasi dengan pihak PDAM, fasilitator dan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana.

Penelitian Rahmawati B, dkk (2022) dengan judul penelitian Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Desa Buakkang telah melakukan langkah- langkah teknis kedaruratan dalam upaya pemulihan pasca bencana alam, seperti melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan, membuka akses jalan yang terisolir melalui aksi gotong royong serta menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Terbatasnya anggaran pemulihan, menyebabkan pemerintah desa melakukan klasifikasi warga penerima bantuan yang didasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi warga.

Penelitian yang dilakukan oleh Rangga Riawan Haryo Praseno dan Gerry Katon Mahendra (2021) dengan judul penelitian Peran Pemerintah Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Dalam Penanggulangan Bencana Kekeringan. Hasil penelitian ini adalah keberhasilan dalam penanggulangan bencana kekeringan di Desa Hargomulyo ditunjukkan dengan tersedianya air bersih dari truk tanki pada bencana kekeringan di setiap tahunnya. Ada tiga peran yang mempengaruhi keberhasilan penanggulangan bencana kekeringan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Salmi Aini (2019) dengan judul penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih Pada Masyarakat Pesisir Lombok Timur. Hasil penelitiannya adalah pemerintah desa sudah menjalankan perannya akan tetapi belum maksimal. Pelaksanaan air bersih yang belum merata terealisasikan atau dinikmati oleh semua masyarakat. Pemerintah desa sudah berusaha penyediaan sumur tauraj dan pamdes.

Penelitian yang dilakukan oleh Vidia Reski Awalia, Mappamiring, Andi Nuraeni Aksa (2015) dengan judul penelitian Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara. Hasil penelitian ini adalah peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di Desa Tahibua bisa dikategorikan sangat baik, karena berdasar dari penuturan masyarakat di Desa Tahibua itu sendiri yang merasakan program-program yang telah pemerintah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intensif dilakukan baik sebelum terjadi dan ketika terjadi bencana.

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Triana dan Nurhadi (2022) dengan judul penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19. Hasil penelitian ini adalah peran Pemerintah Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam penanggulangan wabah Covid-19 sudah berlangsung baik. Hal ini melalui empat indikator utama yaitu pencegahan, penanganan, pendukung dan pembinaan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kekeringan di lokus penelitian yakni di Desa Basuhan sangat menghambat produksi pertanian terutama musim kemarau panjang sehingga diperlukan

alternatif untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari diluar dari pekerjaan utama menjadi petani. Selain itu, lokus penelitian di Desa Basuhan merupakan area karst yang dimana struktur tanahnya sulit menahan air sehingga kebutuhan air sangat penting di Desa Basuhan. Berkaitan dengan struktur tanah yang sulit menahan air tentu sangat berpengaruh pada mata pencaharian pokok warga Desa Basuhan. Waktu penelitian ini dilaksanakan tahun 2024.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam menghadapi kekeringan di Desa Basuhan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah berdasarkan teori peran oleh Ryaas Rasyid.

II. METODE

Peneliti memilih menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengobservasi, mengidentifikasi, dan memahami peran Pemerintah Desa dalam menghadapi kekeringan di Desa Basuhan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan uraian analisis deskriptif dalam penelitian ini agar dapat menggambarkan informasi peran pemerintah desa beserta faktor-faktor yang ada di Desa Basuhan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan teori peran oleh Ryaas Rasyid yang terdiri dari peran pemerintah desa sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai dinamisator, peran pemerintah sebagai regulator, dan peran pemerintah sebagai katalisator.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan pada penelitian ini terdapat 10 informan yang terdiri dari Kepala BPBD Kabupaten Wonogiri, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat BPBD Kabupaten Wonogiri, Kepala Desa Basuhan, Sekretaris Desa Basuhan, Masyarakat Desa Basuhan dan beberapa informan penelitian diambil dengan Teknik *snowball sampling*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Basuhan merupakan wilayah dengan struktur tanah karst atau sulit menahan air sehingga ketika musim kemarau panjang selalu terjadi kekeringan. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Basuhan adalah sebagai petani sehingga pekerjaannya sangat bergantung pada ketersediaan air. Ketika mengalami kekeringan saat musim kemarau panjang, pertanian di Desa Basuhan tidak dapat berjalan karena keterbatasan air. Pertanian di Desa Basuhan sangat terhambat saat musim kemarau panjang. Pertanian tidak dapat diproduksi ketika musim kemarau akibat struktur tanah yang memang tidak bisa menahan air sehingga sumber mata air hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ternak. Untuk menutup kebutuhan sehari-hari lainnya, warga mengandalkan hasil panen tahun kemarin dan menyiapkan produksi pertanian kembali saat musim hujan datang. Alternatif warga saat mengalami kegagalan produksi pertanian selain menjual hasil panen tahun kemarin adalah dengan menjual ternak dan UMKM.

Penulis mendeskripsikan peran pemerintah Desa Basuhan dalam menghadapi kekeringan dengan menganalisis teori peran oleh Ryaas Rasyid, yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, peran

pemerintah sebagai katalisator, peran pemerintah sebagai regulator, dan peran pemerintah sebagai dinamisator.

3.1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator artinya pemerintah menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang timbul dari berbagai masalah, dengan tujuan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Anggraini & Agustina, 2021). Dalam hal ini, masyarakat Desa Basuhan menerima sejumlah dropping air bersih yang bersumber dari berbagai lembaga negeri maupun swasta.

Tabel 1.
Jumlah Dropping Air Bersih Desa Basuhan Tahun 2023

Donatur	Jumlah Tangki
Kemenag Prov. Jateng	10
LPS	15
LZIS Assalam Sukoharjo	10
OJK	10
PJT 1	28
Total	73

Sumber : BPBD Kabupaten Wonogiri, 2023

Desa Basuhan mendapatkan bantuan dropping air bersih sebanyak 73 tangki pada tahun 2023. Namun warga masih harus membeli air tangki setiap bulan dengan harga Rp 160.000,00 per tangki dengan isian satu tangki sekitar 600 liter. Pemerintah Desa Basuhan melaksanakan perannya sebagai fasilitator namun bantuan air yang masuk terkendala di akses medan menuju lokasi. Dilihat dari hal tersebut, akses menuju lokasi sangat penting untuk diperhatikan agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran.

Bantuan air diterima setiap rumah saat musim kemarau sehingga setiap rumah mempunyai penampungan air tadah hujan dimana pembangunan penampungan air tadah hujan menggunakan dana desa. Ketika musim hujan, penampungan air tadah hujan tersebut dimanfaatkan secara alami untuk menampung air hujan dari genteng yang disalurkan ke dalam bak.

Gambar 1.
Penampungan Air Tadah Hujan



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2024

Salah satu sumber tadah hujan di Desa Basuhan yaitu Sumber Kali Beji. Pemerintah Desa memberikan akses kepada warga untuk memanfaatkan sumber mata air tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Ketika musim hujan, sumber mata air tersebut dimanfaatkan sebagai sumber tadah hujan. Ketika musim kemarau, pemerintah memberikan bantuan air kemudian ditampung dalam sumber mata air yang ada di Desa Basuhan.

Gambar 2.
Sumber Kali Beji



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2024

3.2. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Pemerintah mempunyai kedudukan sebagai stake holder untuk mempercepat perkembangan suatu daerah atau negara. Dalam perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan koordinasi dengan multipihak bertujuan untuk memperlancar proses perkembangan. Selain itu juga dapat dengan responsivitas dalam menerima keluhan dan mengembangkan sistem sarana dan prasarana yang dapat menjadi modal sosial dalam mempercepat pembangunan (Firdaus, 2020). Pemerintah desa berperan sebagai katalisator dalam membantu lembaga swasta, lembaga pemerintahan, maupun pihak lainnya dalam memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya. Pada intinya pemerintah desa sebagai penggerak atau katalis agar sesuatu dapat berjalan lebih efektif.

Gambar 3.
Bak Penampungan Air Bersih



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2024

Bak penampungan air bersih pada gambar diatas merupakan bak penampungan air bersih atau tandon air berkapasitas 5000 liter yang terletak di Dusun Kendal Desa Basuhan dan merupakan bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018. Bak penampungan air bersih tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana air bersih di Desa Basuhan. Bak penampungan air bersih selain di Dusun Kendal juga terdapat di Dusun Kenongo, Dusun Wonosumo, dan Dusun Danggolo.

Selain itu, sebagai katalisator pemerintah desa berperan sebagai perantara dalam bantuan yang masuk ke Desa Basuhan. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk menghadapi kekeringan seperti bantuan torn sebagai penampung air, mesin pompa untuk mengambil air yang dalam, dan bantuan air bersih yang langsung disalurkan ke rumah warga.

Tabel 2.

Bantuan Masuk Menghadapi Kekeringan di Desa Basuhan Tahun 2023

No	Jenis Bantuan	Asal	Ket
1	Torn	LPS	Dusun Kendal
2	Mesin Pompa	LPS	Goa Suruh
3	Air Bersih	Dana Desa	Desa Basuhan

Sumber : Desa Basuhan, 2024

Jenis bantuan yang diterima oleh warga Desa Basuhan pada tahun 2023. Bantuan tersebut berasal dari lembaga swasta yaitu LPS Peduli Bhakti Untuk Negeri. Bantuan berupa torn diberikan pada warga Dusun Kendal untuk menampung air bersih dan mesin pompa untuk mengambil air yang

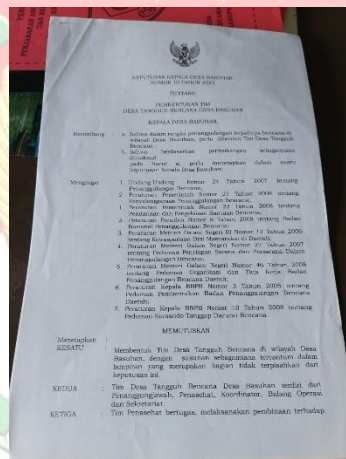
dalam di Goa Suruh. Sedangkan bantuan berupa air bersih yang dari Dana Desa dimanfaatkan untuk seluruh warga Desa Basuhan.

3.3. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Pemerintah berperan mengeluarkan aturan-aturan untuk meningkatkan efisiensi dan keteraturan dalam proses pembangunan administrative (Labolo, 2014).

Dalam menghadapi bencana kekeringan, Pemerintah Desa Basuhan menggunakan acuan Keputusan Kepala Desa Basuhan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Desa Tangguh Bencana Desa Basuhan.

Gambar 4.
Keputusan Kepala Desa Basuhan Nomor 10 Tahun 2023



Sumber : Desa Basuhan, 2024

Keputusan Kepala Desa Basuhan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Desa Tangguh Bencana Desa Basuhan terbentuk susunan tim desa tangguh bencana Desa Basuhan dengan Kepala Desa Basuhan, Ibu Sutini, menjadi penanggung jawab. Dengan adanya regulasi tersebut, pelatihan dan bimbingan teknis bagi para sukarelawan tanggap bencana membantu masyarakat di daerah rawan. Untuk menghadapi musim kemarau dan bencana kekeringan, masyarakat dan sukarelawan dilatih teknik panen air hujan tujuannya untuk pemberdayaan warga dalam upaya penanggulangan bencana.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sekertaris Desa Basuhan selaku koordinator bidang pendataan dan kesekretariatan tim Desa Tangguh Bencana (Destana) pada wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 15 Januari 2024 bahwa pelatihan memberikan materi tentang kajian resiko dan dokumen rencana kontijensi, pemetaan potensi sumber air baku, bagaimana penampungan air hujan, dan juga tentang teknik panen air hujan.

Pembiayaan destana di Desa Basuhan menggunakan dana APBDesa. Pemerintah Desa Basuhan menetapkan anggaran untuk menghadapi kekeringan dan realisasinya yang dimasukkan dalam APBDes Tahun 2023. Berikut ini APBDes Desa Basuhan tahun 2023 alokasi untuk penanganan bencana kekeringan :

Tabel 3.

Alokasi APBDes Desa Basuhan Penanganan Bencana Kekeringan Tahun 2023

Bidang Penanggulangan Bencana Darurat		
No	Anggaran	Jumlah
1	Penanganan Keadaan Darurat	Rp 13.461.000,-
2	Realisasi : Kekeringan Baju Destana Sembako untuk KK Miskin dan Divabel Total	Rp 4.950.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 7.450.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
No	Anggaran	Jumlah
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp 50.171.200,-
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 12.000.000,-
3	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp 2.000.000,-
Total		Rp 53.371.200,-
	Realisasi : a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) b. Peningkatan kapasitas aparatur desa c. Pelatihan UMKM	Rp 48.000.000,- Rp 11.000.000,- Rp 2.000.000,-
Total		Rp 61.000.000,-

Sumber : Desa Basuhan, 2024

Dalam menghadapi bencana kekeringan, terdapat anggaran desa yang terdapat dalam APBDes dan direalisasikan melalui beberapa bidang. Bencana kekeringan dalam bidang penanggulangan

bencana darurat direalisasikan untuk bantuan kekeringan melalui bantuan dana, anggaran destana, dan sembako. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, anggaran dialokasikan pada peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pelatihan UMKM.

3.4. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisor

Menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala- kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Pemerintah Desa Basuhan melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap warga khususnya kelompok tani dalam melakukan penghijauan atau reboisasi. Saat musim hujan tiba, warga mulai menanam produk-produk pertanian yang memiliki nilai jual dan tahan lama seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Pemerintah Desa bersama Imapres Wonogiri melakukan penyaluran dan sosialisasi benih tanaman kepada kelompok tani di Desa Basuhan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kondisi musim hujan dan mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau yang akan datang dengan menanam tanaman selain dari pertanian.

Gambar 5.
Penghijauan bersama Imapres dan Kelompok Tani di Desa Basuhan



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2024

Pemerintah Desa Basuhan telah memberikan pelatihan baik terkait penghijauan maupun alternatif dalam menghadapi kekeringan. Namun kurangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dapat mempengaruhi keterlambatan perkembangan perekonomian. Hal tersebut dapat disebabkan karena Sumber Daya Manusia yang rendah dan pengolahan yang kurang maksimal.

Pemerintah desa memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat terkait penanganan

bencana baik sebelum maupun sesudah. Namun, partisipasi warga masyarakat yang cenderung pasif menjadi hambatan masyarakat untuk berkembang dan hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.

Pemerintah desa memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat terkait penanganan bencana baik sebelum maupun sesudah. Namun, partisipasi warga masyarakat yang cenderung pasif menjadi hambatan masyarakat untuk berkembang dan hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam menjelaskan secara menyeluruh peran pemerintah Desa Basuhan dalam menghadapi kekeringan, ditemukan permasalahan yang terjadi yaitu karena pada dasarnya ketika kekeringan saat musim kemarau panjang, pertanian di Desa Basuhan tidak dapat berjalan sehingga masyarakat memerlukan jalan keluar alternatif untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan peran oleh pemerintah desa terjadi pada dasarnya pada pemanfaatan sumber daya yang kurang maksimal. Masyarakat Desa Basuhan hanya memanfaatkan hasil pertanian tahun kemarin dan tidak banyak yang melakukan inisiasi untuk meningkatkan taraf hidup seperti dengan industry rumah tangga atau dengan kegiatan UMKM. Lokasi Desa Basuhan yang terletak diatas pegunungan dengan struktur tanah karst menambah hambatan dalam menghadapi kekeringan sebab perlu upaya lebih untuk menyalurkan bantuan. Keterbatasan informasi dan sulitnya akses menuju lokasi menghambat tersalurkannya bantuan yang masuk.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian yang dilaksanakan penulis tentang peran pemerintah desa dalam menghadapi kekeringan di Desa Basuhan. Pada musim kemarau panjang, produksi pertanian di Desa Basuhan tidak dapat berjalan dan mengandalkan alternatif lain yaitu penjualan produksi pertanian tahun kemarin dan pekerjaan sampingan. Dengan menganalisis indikator yang ada, maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa dalam menghadapi kekeringan berdasarkan teori peran Ryaas Rasyid telah melaksanakan perannya sebagai fasilitator, katalisator, regulator, dan dinamisator. Pemerinah desa sebagai fasilitator memberikan sarana sumber air tadah hujan, bak penampungan air, dan bantuan dropping air. Sebagai katalisator, pemerintah desa melaksanakan peran dengan memberikan tandon air bersih dan fasilitas lain seperti torn, mesin pompa, dan air bersih. Sebagai regulator, pemerintah desa memiliki peraturan desa sebagai acuan dalam menghadapi kekeringan dan APBDesa yang direalisasikan dalam Destana. Selain itu, pemerintah desa berperan sebagai dinamisator dengan melaksanakan sosialisasi tataboga, sosialisasi pengembangan UMKM kuliner, dan usaha penghijauan dengan reboisasi pohon jati dan mahoni. Namun, disamping pelaksanaan perannya terdapat beberapa kendala seperti kesulitan akses medan dalam memberikan bantuan dropping air, partisipasi masyarakat yang pasif, dan pemanfaatan sumber daya yang belum maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan akses lokasi penelitian. Waktu yang terbatas membuat penulis memadatkan kegiatan observasi dan wawancara

sehingga informasi yang didapatkan terbatas. Akses menuju lokasi sulit dijangkau karena berada di pegunungan dan akses informasi terhambat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian masih pada tahap awal, sehingga penulis menyarankan untuk ada penelitian selanjutnya di lokasi yang serupa berkaitan dengan alternatif usaha masyarakat dalam menghadapi kekeringan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih khususnya ditujukan kepada orang tua dan kakak yang sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri beserta jajarannya, Kepala Desa Basuhan beserta perangkat desa yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, masyarakat desa yang kooperatif, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian sehingga pelaksanaan penelitian dapat terlaksana secara maksimal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, K. D., & Agustina, I. F. (2021). The Role of Village Governments in Reducing the Risk of Flood Disaster Through Disaster Preparedness Villages. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 9, 10–21070.
- Awalia, V. R., Mappamiring, M., & Aksa, A. N. (2015). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 202–213. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.124>
- B, R., Dea Larissa, & Hisbullah. (2022). Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3(2), 393–402.
- Cahyono, T. wahyu. (2023). *Dipetakan Ulang, Desa Rawan Terdampak Kekeringan di Wonogiri Berkurang*. Jawa Pos Radar Solo. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/841706462/dipetakan-ulang-desa-rawan-terdampak-kekeringan-di-wonogiri-berkurang>
- Firdaus, R. (2020). PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI REGULATOR, DINAMISATOR, FASILITATOR, DAN KATALISATOR DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO DI KABUPATEN LUWU UTARA. *Public Administration Journal*, 3(1), 32–40.
- Haryo Praseno, R. R., & Mahendra, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Dalam Penanggulangan Bencana Kekeringan. *Jurnal Caraka Prabu*, 5(1), 114–126. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.417>
- Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. In *Ilmu Pemerintahan* (7th ed.). Rajawali Pers. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/440/2/isi-Memahami Ilmu Pemerintahan.compressed.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/440/2/isi-Memahami%20Ilmu%20Pemerintahan.compressed.pdf)
- Praditia, M. D. (2023). *Ngebor 6 Kali Gagal Terus, Dusun Kerok Wonogiri Masih Kekeringan dan Krisis Air*. Solopos.Com. <https://soloraya.solopos.com/ngebor-6-kali-gagal-terus-dusun-kerok-wonogiri-masih-kekeringan-dan-krisis-air-1733116>
- Prasetyo, A. Y. (2023). *Bencana Kekeringan yang Makin Meluas di Indonesia*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/28/bencana-kekeringan-yang-makin-meluas-di->

indonesia

- Purbaya, A. A. (2023). *Ini Daerah Awas Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis di Jateng*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6926728/ini-daerah-awas-peringatan-dini-kekeringan-meteorologis-di-jateng>
- RI. (2007). Undang-Undang RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. In *RI* (Issue 235). [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Solihah, R. (2019). Pengantar Ilmu Pemerintahan. In *Pengantar Ilmu Pemerintahan*.
- Triana, A. (2022). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH CORONA VIRUS DESEASE 19. *Jurnal Enersia Publika*, 6(1), 79–94.
- wonogirikab. (2023). *PEMKAB WONOGIRI TERIMA BANTUAN PENANGGULANGAN KEKERINGAN DARI LPS*. Wonogirikab.Go.Id. <https://wonogirikab.go.id/pemkab-wonogiri-terima-bantuan-penangulangan-kekeringan-dari-lps/>

